

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 2 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut undang-undang tindak pidana korupsi dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan normatif-yuridis merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menelaah dan mengidentifikasi pasal undang-undang tindak korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dalam tindak pidana korupsi. Terdapat tiga rumusan masalah penelitian, yang pertama bagaimana pelaksanaan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia; kedua, kendala pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 2 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001; dan ketiga, bagaimana efektifitas penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan meningkatkan wawasan tentang pelaksanaan hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Tindak pidana korupsi, Korupsi, Pidana Mati.

Abstract

The study analyzes the implementation of the death penalty against perpetrators of criminal acts of corruption according to Article 2 section 2 of Law No. 31 of 1999 Jo Law No. 20 of 2001. This study aims to examine the implementation of the death penalty against perpetrators of criminal acts of corruption according to the corruption law and positive law in Indonesia. The normative-juridical approach is a method used in this study by analyzing and identifying articles of the Corruption Act and the Criminal Code (KUHP) related to the crime of corruption. Three issues are discussed: first, the implementation of the death penalty against perpetrators of criminal acts of corruption crimes in Indonesian positive law; second, the obstacles to the implementation of the death penalty against perpetrators of criminal acts of corruption crimes according to Article 2 section 2 of Law No. 31 of 1999 Jo Law No. 20 of 2001; and third, the effectiveness of the application of the death penalty against perpetrators of criminal acts of corruption crimes in Indonesia. This study is hopefully to be beneficial and broaden the perspective on the implementation of death penalty against perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia.

Keywords: *Criminal Acts of Corruption, Corruption, Death Penalty.*